



**NASKAH AKADEMIK
KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM
MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM
2007**

ABSTRAK

Kehidupan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat dilihat baik dalam konteks keruangan (tempat tinggal) maupun konteks waktu. Berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus dapat ditangkap oleh lembaga pendidikan yang kemudian menjadi sumber bahan materi pembelajaran. Sumber bahan pelajaran secara formal dapat dituangkan dalam bentuk kurikulum yang hendaknya memiliki landasan filosofis yang jelas. Landasan filosofis yang digunakan seyogyanya melihat kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

Tujuan penyusunan naskah akademik Kurikulum mata pelajaran IPS adalah untuk memberikan pedoman yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pengembang kurikulum masa depan mata pelajaran IPS, memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi pihak terkait, sehingga mereka dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan kurikulum masa depan, dan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran IPS di satuan pendidikan dasar dan menengah.

Naskah akademik ini mencakup kajian pelaksanaan Standar Isi mata pelajaran IPS satuan pendidikan dasar dan menengah dan permasalahannya, serta konsep pengembangan kurikulum masa depan mata pelajaran IPS. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah kajian pustaka dan kajian dokumen hasil-hasil kegiatan kajian kebijakan kurikulum mata pelajaran IPS. Sedangkan peserta yang terlibat adalah ahli pendidikan dari perguruan tinggi dan praktisi pendidikan.

Naskah akademik kurikulum IPS ini telah menghasilkan rekomendasi, yaitu tentang konsep pengembangan kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk masa depan yang lebih memfokuskan muatan multikultur dan nilai-nilai humanis. Selain itu, juga merekomendasi untuk pemecahan masalah dalam implementasi kurikulum, seperti dokumen kurikulum, pengembangan silabus, strategi pembelajaran, penilaian berbasis kelas, sarana pembelajaran, dan kualitas guru.

KATA PENGANTAR

Pemberlakuan UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menuntut cara pandang yang berbeda tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Dulu, pengembangan kurikulum dilakukan oleh pusat dalam hal ini Pusat Kurikulum sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh satuan pendidikan.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan langsung oleh satuan pendidikan memberikan harapan tidak ada lagi permasalahan berkenaan dengan pelaksanaannya. Hal ini karena penyusunan kurikulum satuan pendidikan seharusnya telah mempertimbangkan segala potensi dan keterbatasan yang ada.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar nasional pendidikan: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Salah satu dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yakni standar isi (SI) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum disamping standar kompetensi lulusan (SKL). Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Pengembangan kurikulum telah dilakukan oleh sebagian satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada standar isi. Sebagai acuan, standar isi ini masih perlu ditelaah. Penelaahan dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang ada-tidaknya rumusan pada standar isi yang menimbulkan permasalahan bila digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Penelaahan standar isi ini dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan pengkajian.

Hasil pengkajian antara lain berupa naskah akademik :

1. Kajian Kebijakan Kurikulum SD
2. Kajian Kebijakan Kurikulum SMP
3. Kajian Kebijakan Kurikulum Kesetaraan Dikdas
4. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama
5. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Kewarganegaraan
6. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa
7. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Matematika
8. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPA
9. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPS
10. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Keterampilan
11. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Kesenian
12. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran TIK
13. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani

Salah satu hasil kajian tersebut di atas adalah **Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPS**. Naskah akademik ini memberikan gambaran tentang kajian pelaksanaan Standar Isi mata pelajaran IPS satuan pendidikan dasar dan menengah dan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya sebagai masukan bagi perumus kebijakan pendidikan lebih lanjut, serta konsep pengembangan kurikulum masa depan mata pelajaran IPS bagi pihak terkait.

Pusat Kurikulum menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada banyak pakar yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi, Direktorat di lingkungan Depdiknas, kepala sekolah, pengawas, guru, dan praktisi pendidikan, serta Depag. Berkat bantuan dan kerja sama yang baik dari mereka, naskah akademik ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Kepala Pusat Kurikulum
Badan Penelitian dan Pengembangan
Depdiknas,

Diah Harianti

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Yuridis
- C. Tujuan

Bab II Kajian Pelaksanaan Standar Isi Mata Pelajaran IPS

- A. Pelaksanaan Standar Isi
- B. Permasalahan-Permasalahan Pelaksanaan Standar Isi (SI) IPS
- C. Pemecahan Masalah Terhadap Pelaksanaan Standar Isi IPS

Bab III Kajian Teori

- A. Landasan Filosofis
- B. Perkembangan Psikologi Siswa
- C. Pengertian dan Tujuan IPS
- D. Pengorganisasian Materi

Bab IV Kurikulum Masa Depan Mata Pelajaran IPS

- A. Visi Mata Pelajaran IPS
- B. Konsep Materi Kurikulum IPS

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran.

Kehidupan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat dilihat baik dalam konteks keruangan (tempat tinggal) maupun konteks waktu. Berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus dapat ditangkap oleh lembaga pendidikan yang kemudian menjadi sumber bahan materi pembelajaran. Sumber bahan pelajaran secara formal dapat dituangkan dalam bentuk kurikulum.

Kurikulum IPS yang dikembangkan hendaknya memiliki landasan filosofis yang jelas. Landasan filosofis yang digunakan hendaknya melihat kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Kondisi masyarakat yang terjadi saat ini adalah masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh adanya interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok.

Dalam konteks yang lebih luas perubahan yang terjadi melahirkan globalisasi. Dalam globalisasi terjadi pola interaksi yang serba cepat melewati batas-batas keruangan dan waktu. Hubungan antarindividu maupun kelompok dalam globalisasi ini melahirkan suatu pola hubungan yang kompetitif. Individu maupun kelompok dalam pola hubungan ini akan terjadi adanya hubungan yang saling mempengaruhi. Sistem nilai yang dipegang oleh masing-masing individu maupun kelompok akan saling berpengaruh dalam pola hubungan tersebut. Hal yang harus dihindari dalam pola hubungan seperti ini adalah adanya hubungan yang bersifat eksploitatif dan hegemoni kelompok yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, harus pula dihindari adanya ketercerabutan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang berdampak pada hilangnya identitas atau jati diri dari masyarakat tersebut.

Dalam mencermati perubahan-perubahan tersebut maka kurikulum IPS harus memiliki landasan filosofis humanistik. Dalam prinsip tersebut, IPS harus menjunjung tinggi sifat-sifat dasar kemanusiaan. Prinsip-prinsip dasar kemanusiaan tersebut meliputi keadilan, kesetaraan, kearifan, dan keragaman. Kurikulum IPS harus mampu membangun jati diri bangsa yang berbasis pada kearifan lokal untuk menuju pada masa depan. Globalisasi yang terjadi baik pada masa sekarang maupun di masa depan harus disikapi baik secara lokal maupun mondial. Masyarakat yang akan dibentuk dari pendidikan IPS ini adalah masyarakat yang mendunia yang tetap berpijak pada kearifan lokal. Dalam kearifan lokal, tumbuh adanya kesadaran keruangan dan kesadaran waktu. Kesadaran ruang yang dimaksud adalah menyadari dimana dia tinggal, sedangkan kesadaran waktu yaitu memahami bahwa dia hidup dalam suatu masyarakat yang berubah. Jadi, globalisasi tidak mencerabut akar-akar budaya yang dimilikinya.

Pendidikan IPS juga harus mampu mengatasi masalah-masalah sosial kontemporer pada masyarakat seperti rendahnya etos kerja dan menurunnya jiwa kewirausahaan. Hal tersebut sesuai dengan hakikat IPS yaitu bidang studi tentang tingkah laku kelompok umat manusia (*the study of the group behavior of human beings*) (Calhoun (1971:42). yang sumber-sumbernya digali dari kehidupan nyata di masyarakat. Untuk

itu pembelajaran IPS yang diramu dalam kurikulum harus memiliki peran penting dalam menyiapkan peserta didik mengembangkan nilai-nilai kerja keras, hemat, jujur, disiplin, kecintaan pada diri dan lingkungannya serta memiliki semangat kewirausahaan (Nana Supriatna, 2007:2). Hal itu senada dengan pendapat Nursid Sumaatmaja yang menyatakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan masyarakat (1980:20).

Sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang mengatur tingkat satuan pendidikan (dasar sampai menengah), maka batasan ruang lingkup materi (*scope*) IPS yang harus dikaji siswa perlu diperhatikan. Dari pokok kajian yang ada, mana yang harus dipelajari siswa dan mana yang tidak perlu mereka pelajari. Hal pokok tersebut adalah sesuatu yang mau tidak mau merupakan bagian dasar dari mereka yang akan belajar disiplin ilmu itu (Hamid Hasan, 1996).

Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam rangka melaksanakan pengkajian kurikulum mata pelajaran IPS jenjang pendidikan dasar dan menengah, naskah akademik ini disusun untuk melakukan pengembangan model kurikulum ke depan yang menjadi tanggung jawab Pusat Kurikulum.

B. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

C. Tujuan

Tujuan penyusunan naskah akademik Kurikulum mata pelajaran IPS pada tingkat sekolah dasar dan menengah pada dasarnya untuk memberikan pedoman yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pengembang kurikulum IPS ke depan. Secara rinci, penyusunan naskah akademik ini diantaranya bertujuan untuk:

- 1) Memberikan arahan dan masukan bagi para pengembang kurikulum, khususnya mata pelajaran IPS
- 2) Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi pihak terkait, sehingga mereka dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan kurikulum masa depan.
- 3) Memberikan acuan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran IPS di sekolah dasar dan menengah.

BAB II

KAJIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI MATA PELAJARAN IPS

A. Pelaksanaan Standar Isi

Pelaksanaan Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdapat beberapa hal yang patut dicermati yaitu :

1. Keragaman Pelaksanaan

Pelaksanaan KTSP di sekolah-sekolah terdapat keragaman, khususnya keragaman dalam pelaksanaan di setiap jenjang. Ada sekolah yang melaksanakan sekaligus semua jenjang yaitu di SD langsung dilaksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ; di SMP dari kelas VII sampai dengan kelas IX ; dan di SMA dari kelas X sampai dengan kelas XII. Selain itu ada pula sekolah-sekolah yang melaksanakan secara berjenjang perkelas, misalnya di SMP pada tahun 2006 dilaksanakan hanya di kelas VII dan di kelas VIII pada tahun 2007 sedangkan di kelas IX baru akan dilaksanakan pada tahun 2008. Begitu pula halnya di SMA, pelaksanaan di kelas X pada tahun 2006, kelas XI tahun 2007, dan kelas XII baru tahun 2008.

Keragaman pelaksanaan tersebut memiliki berbagai alasan. Sekolah yang melaksanakan KTSP secara keseluruhan pada semua jenjang beralasan agar kurikulum yang dilaksanakan di sekolah tersebut seragam dan merasa siap untuk melaksanakannya. Sedangkan sekolah yang melaksanakan secara berjenjang dengan alasan mengikuti peraturan sebagaimana diatur dalam Permendiknas no. 23 yang mengatakan pelaksanaan KTSP dilakukan secara berjenjang dan membolehkan bagi sekolah yang siap untuk melaksanakan di seluruh jenjang. Alasan lainnya adalah ketidaksiapan sekolah-sekolah tersebut untuk melaksanakan KTSP secara menyeluruh pada semua jenjang.

2. Tugas guru mengajar

Guru yang mengajar IPS baik di SD, SMP dan SMA mengikuti pada pengorganisasian materi kurikulum IPS. Pengorganisasian kurikulum IPS di SD lebih bersifat terpadu atau integrasi, jadi pelaksanaan pengajaran IPS di SD dipegang oleh satu orang guru. Perubahan pengorganisasian materi IPS pada KTSP ini adalah di SMP. IPS di SMP diorganisasikan menjadi IPS Terpadu, sehingga berimplikasi pada tugas guru yang mengajar. Dalam hal bagaimana guru IPS di SMP mengajar terjadi keragaman. Ada sekolah yang mengajarkan IPS di SMP dipegang oleh satu orang. Konsekuensinya, guru tersebut harus mengajar sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi. Pelaksanaan seperti itu beralasan bahwa mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang satu, bukan mata pelajaran yang dipisah-pisahkan walaupun materinya bersumber dari sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi. Selain itu ada pula SMP yang mengajarkan IPS, dipegang oleh beberapa orang guru sesuai dengan disiplinnya, yaitu sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi. Jadi pelaksanaan pengajaran IPS dibagi ke dalam empat bidang studi. Alasan pelaksanaan yang demikian pertama untuk pemerataan guru mata pelajaran (sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi), kedua pentingnya profesionalisme penguasaan materi oleh guru. Mata pelajaran apabila diajarkan oleh guru yang bukan disiplinnya akan menjadi kurang berkualitas, misalnya sejarah diajarkan oleh guru yang berlatar belakang pendidikan geografi atau sebaliknya. Sedangkan pengajaran IPS di SMA dalam implementasi penugasan guru tidak terjadi perubahan sebagaimana halnya di SMP, karena pengorganisasian materi IPS di SMA

sudah terpisah-pisah secara disiplin. Jadi ada guru yang secara khusus mengajar sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi.

3. Pemahaman Standar Isi

Secara teoretis sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 22 bahwa standar isi merupakan cakupan lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian sekolah atau satuan pendidikan diminta untuk menjabarkan materi sebagaimana yang ada dalam standar isi disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Pemahaman standar isi di lapangan terdapat dua bentuk pelaksanaan. Bentuk pertama yaitu Standar Kompetensi dan kompetensi dasar lebih banyak dipahami sebagai materi yang harus diberikan di sekolah tanpa pengembangan lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Pemahaman seperti itu berakibat pada pembelajaran guru lebih berorientasi pada materi, bukan pada kompetensi. Hal ini terjadi disebabkan penyampaian materi IPS di sekolah lebih banyak berdasar pada buku teks, bukan pada dokumen standar isi. Sehingga KTSP yang dikembangkan di sekolah belum menggambarkan KTSP yang memiliki ciri khas sekolah atau daerah tersebut. Sebab buku-buku teks yang digunakan lebih banyak memaparkan materi yang masih bersifat umum yang bisa berlaku pada semua sekolah atau daerah.

Bentuk kedua, sekolah yang mencoba memahami standar isi sebagai kompetensi yang harus dikembangkan di sekolah. Materi yang ada di dalam dokumen KTSP hanyalah merupakan materi standar yang harus dikembangkan oleh guru atau satuan pendidikan. Dalam pengembangannya ini melihat kekhasan dari satuan pendidikannya atau daerahnya. Model pengembangan seperti ini berarti sekolah telah mengembangkan KTSP sebagaimana yang dikehendaki.

B. Permasalahan-Permasalahan Pelaksanaan Standar Isi (SI) IPS

Pelaksanaan KTSP mata pelajaran IPS yang diberlakukan sejak tahun 2006 menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Sosialisasi KTSP belum merata

Berdasarkan temuan di lapangan khususnya ketika dilakukan berbagai pelatihan yang berkenaan dengan pelaksanaan KTSP baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Propinsi/Kabupaten/Kota) maupun oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di berbagai daerah, tidak jarang ditemukan guru yang belum paham tentang KTSP. Bila ditelusuri kegiatan sosialisasi ini berawal dari beberapa orang guru dari berbagai daerah diundang oleh BSNP. Kemudian mereka dijadikan penatar KTSP untuk tingkat nasional dan daerah. Informasi itu diestafetkan kembali di tingkat propinsi sampai daerah. Di daerah tidak seluruh guru dapat mengikuti kegiatan sosialisasi. Kalaupun ada, baru pada tataran MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bagi mereka yang aktif di MGMP. Sebenarnya estafet informasi itu sudah baik, namun tatkala mereka kembali ke sekolah masing-masing, guru yang diharapkan jadi mediator untuk guru-gurunya di sekolah tidak dan atau kurang memberikan informasi yang telah didapatnya itu. Pada akhirnya tidak sedikit sekolah mengundang para pejabat terkait diundang, mulai dari Kepala Sekolah, Subdin Dikdasmen, Pengawas, dan Pakar Kurikulum untuk menjelaskan tentang dokumen KTSP. Tetapi kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh sekolah yang

memiliki dana. Bagi sekolah yang tidak memiliki dana, jelas KTSP hanya sebatas yang mereka dengar sehingga pemahaman pada KTSP sangat minim. Demikian juga dengan pedoman petunjuk teknis KTSP yang belum disosialisasikan menambah kaburnya implementasi kurikulum. Pada akhirnya tidak seluruh sekolah sudah menerapkan KTSP.

2. Guru masih berorientasi pada buku teks, tidak mengacu pada dokumen kurikulum

Dokumen kurikulum (KTSP) yang dikeluarkan oleh BSNP melalui dinas pendidikan, baik tingkat pusat dan daerah telah menyebar ke berbagai sekolah sebagai pelaksana dan pengembang kurikulum. Berbagai media, cara dan sarana untuk menyebarkan kurikulum itu telah ditempuh oleh BSNP, seperti workshop, pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Sasaran dari penggunaan berbagai media dan kegiatan itu diharapkan agar pelaksana kurikulum (guru) memahami dan melaksanakan proses belajar mengajar yang mengacu pada kurikulum. Tetapi berdasarkan penemuan di lapangan ketika melakukan pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan PBM, masih banyak guru dalam PBM tidak mengacu pada kurikulum. Mereka lebih memilih pada buku teks yang dianggap sudah menjabarkan kurikulum. Untuk itu tidak jarang guru yang tahu kurikulum hanya pada batas wacana, bukan pada dokumen kurikulum yang sebenarnya. Buku teks menjadi sarana yang memadai dalam menjabarkan kurikulum. Kondisi ini jelas salah, karena seharusnya guru sendiri yang harus menjabarkan dan mengembangkan kurikulum.

3. Dokumen Kurikulum

Standar isi Mata Pelajaran IPS yang memuat Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar terdapat dua masalah yaitu sequens dan isi atau content.

- a. Sequens

Sequens yang digunakan tidak jelas konsepnya apakah menggunakan pendekatan kronologis, kausalitas, tematis, dan lainnya. Ketidakjelasan penggunaan konsep sequens berdampak pada materi yang tidak jelas urutannya, apakah diurut berdasarkan keluasan ruang lingkup materi, unsur kronologi waktu atau yang lainnya. Terdapat sequens materi yang tidak berurutan, baik SK dan KD tingkat SD, SMP dan SMA. Berikut ini beberapa contoh urutan SK dan KD yang tidak jelas urutannya. Misalnya di SD pada Kelas 3 Semester 2 urutannya yang semula menguraikan contoh jual beli di lingkungan di rumah dan sekolah (KD. No. 2.3) baru kemudian dibahas sejarah uang (KD. No. 2.4), sebaiknya dibahas dahulu sejarah uang baru kemudian dibahas contoh-contoh praktek jual beli.

Urutan yang digunakan dalam IPS SMP tidak jelas konsepnya apakah konsep Kurikulum IPS Terpadu, Korelasi, atau Terpisah-Pisah. Walaupun diberi nama IPS Terpadu akan tetapi dalam kenyataannya SK dan KD tetap terpisah-pisah antara Sejarah, Ekonomi, Geografi dan Sosiologi, sehingga materi yang tercantum dalam SK dan KD tidak berurutan. Ada upaya untuk memadukan dalam suatu tema yang diuraikan dalam KD yang beragam, misalnya KD nya tersebut ada aspek sejarah dan Geografi. Tetapi cara memadukannya tersebut kurang tepat, misalnya pada kelas VII semester 1 KD No. 1.1. dan No. 1.2. tidak ada kaitannya kalau melihat SK No. 1. SK nya lebih dekat dengan geografi sedangkan KD. No. 1.2. berisikan sejarah. Pada sisi lain ada SK yang hanya sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Seperti pada Kelas VII semester 2, SK no. 4, 5 dan 6. SK no. 4 geografi, SK no. 5 sejarah dan SK no. 6 ekonomi.

Sequens untuk SMA nampak tidak jelas dalam mata pelajaran Sejarah di Jurusan IPA dan Bahasa sebaiknya disamakan dengan sequens pada jurusan IPS. Hal ini penting agar ada penyeragaman materi sebab misi pelajaran sejarah adalah membangun jati diri bangsa dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

b. Materi (content)

Pada umumnya materi mata pelajaran IPS dan alokasi waktu yang disediakan kurang proporsional. Waktu yang diberikan sangat singkat sedangkan materi yang harus diberikan cukup banyak. Misalnya jumlah mata pelajaran sejarah di Program IPA SMA hanya satu jam sementara materi yang harus diberikan cukup banyak. Begitu pula pelajaran Geografi pada kelas 1 hanya diberikan waktu 1 jam. Begitu pula dalam mata pelajaran Ekonomi, KD pada mata pelajaran ekonomi kelas XII IPS terlalu padat. Pada Kelas X materi pelajaran ekonomi terlalu banyak, alokasi jamnya tidak cukup.

Selain alokasi waktu yang tidak proporsional, terdapat juga sebaran materi yang tidak merata, khususnya pada IPS di SD dan SMP. Semestinya proporsi sebaran materi sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi merata pada setiap semester dan kelas. Misalnya materi IPS SD untuk kelas V hampir seluruhnya materi sejarah. Begitu pula IPS SMP, pada kelas VII semester 1 materi Sejarah sangat sedikit, hanya ada dalam satu KD dan itupun berada dalam SK yang lebih cocok untuk geografi.

4. Penyusunan Program Silabus dan RPP

Guru dalam menyusun Silabus dan RPP belum banyak memperlihatkan kekhasan pada satuan pendidikannya. Tuntutan KTSP yang harus memperlihatkan situasi dan kondisi sekolah atau daerah semestinya menjadi bahan dalam materi pelajaran. Hal ini terjadi dikarenakan perumusan indikator dan tujuan belum dirumuskan sendiri oleh guru. Ada kecenderungan, guru-guru membuat indikator mengcopy dari buku teks yang mencantumkan indikator dari masing-masing materi yang akan disampaikan. Selain itu guru harus bisa membedakan rumusan indikator dan tujuan, sehingga tidak rancu dalam merumuskan silabus dan RPP. Pemahaman terhadap perbedaan indikator dan rumusan tujuan, ada perbedaan antara guru dan pengawas di lapangan. Hal ini dapat menyulitkan guru dalam merumuskan Silabus dan Indikator, karena kedudukan pengawas sebagai penilai kinerja guru.

5. Struktur Program

Struktur program pada mata pelajaran IPS masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara alokasi waktu yang disediakan dengan keluasaan materi yang harus disampaikan kepada siswa. Khususnya pada mata pelajaran Geografi SMA kelas X, Sejarah untuk kelas X dan program IPA.

6. Strategi Pembelajaran

Ada suatu kecenderungan pemahaman yang salah bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran yang cenderung pada hafalan. Pemahaman seperti ini berakibat pada pembelajaran yang lebih menekankan pada verbalisme. Guru dalam menerapkan metode pembelajaran lebih menekankan pada metode yang lebih menekankan pada aktivitas guru, bukan pada aktivitas siswa. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang variatif. Misalnya guru lebih banyak menggunakan metode ceramah bahkan menyuruh siswa untuk mencatat.

7. Penilaian

Penilaian merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator dan tujuan yang telah ditetapkan baik dalam silabus maupun RPP.

Bentuk penilaian yang digunakan hendaknya harus sesuai dengan tuntutan indikator dan tujuan. Pada umumnya guru melakukan penilaian lebih banyak menggunakan alat-alat penilaian yang masih konvensional yaitu tes tertulis. Tes yang digunakan pun masih banyak mengukur aspek kognitif pada jenjang yang lebih rendah misalnya kemampuan untuk menyebutkan. Penggunaan bentuk tes yang demikian disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang materi IPS. Materi IPS dipahami sebagai materi yang hapalan saja, sehingga tes yang digunakan pun lebih menekankan pada hapalan. Padahal berbagai keterampilan berpikir dalam IPS bisa diuji melalui penilaian yang dibuat oleh guru.

8. Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. Pada umumnya sarana untuk mendukung pembelajaran IPS masih sangat minim. Belum adanya semacam laboratorium IPS yang dapat dijadikan tempat siswa untuk mempraktekan materi-materi yang disampaikan di kelas. Misalnya ada laboratorium bagi siswa untuk mempraktekan bagaimana melakukan penginderaan jauh, praktek bagaimana cara bertransaksi dengan bank, praktek bagaimana mengenal benda-benda bersejarah, dan lain-lain. Dengan adanya sarana pembelajaran yang baik maka pembelajaran IPS dapat melihat realitas kehidupan sehari-hari yang merupakan suatu fenomena sosial. Pemahaman seperti inilah menjadikan IPS tidak lagi dipahami sebagai mata pelajaran hafalan.

9. Kualifikasi Guru

Ada suatu anggapan bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran yang mudah karena hanya hafalan saja, sehingga siapa saja dapat mudah menjadi guru IPS. Anggapan ini berdampak pada kualifikasi guru IPS. Masih banyak guru yang mengajar IPS tidak memiliki latar belakang pendidikan IPS. Padahal untuk menjadi guru IPS harus memiliki latar belakang pendidikan IPS. Hal ini disebabkan IPS merupakan satu disiplin ilmu yang memiliki konsep dan teori-teori, yang hanya dapat dipahami melalui jalur pendidikan profesional. Apabila guru yang mengajar IPS bukan berlatar belakang pendidikan IPS, maka akan sulit memahami konsep-konsep atau teori-teori yang ada dalam IPS. Guru yang demikian akan berdampak pada cara pembelajaran yang dilakukannya. Ada kemungkinan pembelajaran yang dilakukan lebih menekankan pada hafalan saja, sehingga keterampilan-keterampilan berpikir dalam IPS tidak dikembangkan.

C. Pemecahan Masalah Terhadap Pelaksanaan Standar Isi IPS

Berdasarkan uraian masalah terhadap pelaksanaan standar isi IPS, maka perlu dilakukan berbagai pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi KTSP

Sosialisasi KTSP hendaknya tidak hanya mengandalkan pada instansi yang bersifat struktural seperti BSNP, Dinas Pendidikan (Propinsi, Kabupaten, Kota), dan lain-lain. Sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah lebih bersifat pro aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Hendaknya sekolah sendiri secara internal melakukan sosialisasi KTSP. Sekolah dapat menggunakan guru yang telah dilatih untuk menjadi instruktur di sekolahnya dalam pelatihan KTSP. Hal terpenting adalah adanya kepedulian dari Kepala Sekolah untuk melakukan pelatihan KTSP di sekolahnya. Dengan cara demikian maka sosialisasi KTSP akan semakin merata.

2. Dokumen

Dokumen standar isi yang memuat Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar perlu ditata kembali. Dalam penataan tersebut harus memperhatikan landasan-landasan kurikulum yang akan dipakai. Sequens materi harus jelas landasan konsepnya. Misalnya pada tingkat SD diorganisasikan secara terpadu. Sedangkan pada tingkat SMP ada dua pilihan, yaitu pertama, kalau ingin mengembangkan IPS Terpadu, maka SK dan KD yang dikembangkan harus lebih menggunakan pendekatan tematis. Kedua, apabila disiplin pada masing-masing ilmu sosial masih nampak maka menggunakan model pengorganisasian yang korelasi. Sedangkan untuk tingkat SMA pengorganisasian materi digunakan dengan pendekatan terpisah-pisah, artinya sejarah diajarkan sebagai sejarah, ekonomi sebagai ekonomi, sosiologi sebagai sosiologi, dan geografi sebagai geografi.

Selain pengorganisasian materi yang jelas, hal yang harus dilakukan adalah sequens dan content harus jelas. Materi yang dicantumkan harus disederhanakan dan proporsional. Tidak ada pengulangan materi pada jenjang berikutnya dan tidak ada penumpukkan materi pada semester-semester tertentu. Sequens bisa dilihat dari aspek kronologi, tingkat kesulitan, dan keluasan materi. Mulai dari penyajian materi yang mudah, sedang hingga sulit dipahami. Begitu pula dalam keluasan materi, mulai dari ruang lingkup yang kecil hingga ke ruang lingkup yang meluas.

3. Penyusunan Program Silabus dan RPP

Untuk mengatasi kesulitan guru dalam merumuskan Silabus dan RPP, hendaknya perlu dilakukan pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana menyusun Silabus dan RPP yang baik. Agar guru dapat menyusun Silabus dan RPP yang baik hendaknya guru dapat mengenal dan mengidentifikasi apa yang menjadi ciri khas sekolah dan daerahnya. Harus ada pedoman penyusunan Silabus dan RPP baik yang bersifat umum maupun yang bersifat lokal. Pemahaman guru terhadap kekhasan lokal perlu adanya sosialisasi dengan pihak pemda, dinas pendidikan dan sekolah. Pemda harus menetapkan apa yang menjadi keunggulan lokal dari daerah tersebut yang akan dituangkan dalam program pendidikan. Program pemda tersebut kemudian disosialisasikan kepada sekolah melalui dinas pendidikan.

4. Struktur Program

Struktur program mata pelajaran IPS hendaknya proporsional antara lingkup materi dengan alokasi waktu yang disediakan. Perlu ditata ulang struktur program mata pelajaran IPS. Apabila ruang lingkup materi akan tetap seperti sekarang maka perlu ditambah alokasi waktunya. Sebaliknya apabila alokasi waktu tetap seperti yang tercantum sekarang maka sebaiknya ruang lingkup materi disederhanakan. Penyederhanaan materi harus menekankan pada materi-materi yang bersifat esensial.

5. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam mata pelajaran IPS hendaknya lebih menekankan pada aktivitas siswa. Metode pembelajaran yang dilakukan hendaknya yang menuntut berbagai jenjang kemampuan siswa. Jenjang kemampuan siswa yang dituntut tidak hanya pada level yang rendah, misalnya kemampuan menghafal. Berbagai keterampilan berpikir dapat dikembangkan, misalnya kemampuan berpikir kritis dilakukan dengan metode diskusi, kemampuan melakukan penelitian atau obserbasi menggunakan metode proyek, kemampuan afektif menggunakan metode role playing atau sosio drama, dan contoh-contoh yang lainnya. Agar guru dapat menguasai berbagai metode

mengajar maka perlu dilakukan pelatihan tentang berbagai metode mengajar dalam mata pelajaran IPS.

6. Penilaian

Penilaian berfungsi untuk mengukur ketercapaian kompetensi, indikator dan tujuan yang telah ditetapkan dalam silabus dan RPP. Penilaian yang dikembangkan hendaknya tidak terbatas pada penggunaan tes saja. Guru harus menggunakan berbagai model alat penilaian, seperti asesmen kinerja, portofolio, dan jenis-jenis penilaian non tes. Penetapan penggunaan alat penilaian tergantung kepada rumusan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mata pelajaran IPS berbagai keterampilan dapat dikembangkan, misalnya keterampilan sosial menggunakan alat penilaian skala sikap, keterampilan penelitian menggunakan asesmen portofolio, dan yang lainnya.

7. Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran sangat penting dalam menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada umumnya sarana pembelajaran IPS sangat penting. Untuk memecahkan hal demikian maka sebaiknya guru menggunakan sarana pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya apabila sekolah tersebut dekat dengan pasar maka gunakanlah untuk mempraktekan pelajaran ekonomi dan sosiologi. Dalam mata pelajaran ekonomi guru dapat menugaskan kepada siswa untuk mempraktekan bagaimana jual beli dan pertukaran barang. Pelajaran sosiologi dapat mempraktekan materi bagaimana interaksi sosial yang terjadi di pasar. Begitu pula apabila ada situs-situs sejarah yang dekat guru dapat menjadikan sarana pembelajaran mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran Geografi dapat melihat bagaimana kondisi geografis yang dekat dengan sejarah. Misalnya apabila di dekat sekolah ada kawasan yang penuh dengan batuan-batuan maka guru dapat menggunakan daerah tersebut untuk praktek mengenal berbagai jenis batuan. Dengan cara penggunaan sarana yang demikian, maka model pembelajaran yang digunakan oleh guru lebih melihat kepada apa yang dapat dilihat langsung oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Model seperti ini dikenal dengan istilah Contextual Teaching Learning (CTL).

8. Kualifikasi Guru

Kurangnya guru yang berkualifikasi dalam mata pelajaran IPS dapat dilakukan melalui pengangkatan guru yang sesuai dengan bidangnya. Selain itu, guru yang ada dan berlatar belakang bukan IPS dapat diberikan semacam pelatihan secara intensif mengenai materi IPS dan bagaimana cara pembelajarannya. Cara seperti ini dilakukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru IPS.

BAB III KAJIAN TEORI

A. Landasan Filosofis

Pengembangan suatu kurikulum harus memiliki landasan filosofis. Hal ini perlu dilakukan agar memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam implementasinya. Secara teoritis, terdapat beberapa pandangan filosofi kurikulum yaitu esensialisme, perenialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme.

Esensialisme adalah aliran yang menekankan bahwa kurikulum harus menekankan pada penguasaan ilmu. Aliran ini berpandangan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah pendidikan keilmuan. Kurikulum yang dikembangkan dalam aliran esensialisme adalah kurikulum disiplin ilmu. Tujuan utama implementasi kurikulum menurut aliran ini adalah intelektualisme (S. Hamid Hasan, 1996 : 57-58). Proses belajar mengajar yang dikembangkan adalah siswa harus memiliki kemampuan terhadap penguasaan disiplin ilmu. Implementasi pembelajaran seperti ini akan lebih banyak menekankan pada dominasi guru yang berperan daripada siswa. Dengan adanya dominasi guru dalam pembelajaran, maka akan menekankan pembelajaran yang *academic excellence and cultivation of intellect*, daripada kemampuan untuk mengembangkan proses *inquiry* guna memproduksi pengetahuan baru (Nana Supriatna, 2007 : 31-32). Sekolah yang baik dalam pandangan aliran filsafat esensialis adalah sekolah yang mampu mengembangkan intelektualisme siswa. Implementasi mata pelajaran IPS menurut aliran esensialis akan lebih menekankan IPS pada aspek kognitif belaka daripada aspek afektif. Siswa belajar IPS akan lebih berorientasi pada pemahaman konsep-konsep IPS daripada penerapan materi yang ada pada IPS bagi kehidupan sehari-hari.

Perenialisme memandang bahwa sasaran yang harus dicapai oleh pendidikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran dan nilai yang abadi, serta tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dalam pandangan ini, kurikulum akan menjadi sangat ideologis karena dengan pandangan perenialisme menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diinginkan oleh negara. Pandangan perenialis lebih menekankan pada transfer of culture, seperti dalam kurikulum IPS yang bertujuan pada pembangunan jati diri bangsa pada peserta didik, yang menuju tercapainya integrasi bangsa (Nana Supriatna, 2007 : 31).

Filsafat progresivisme memandang bahwa sekolah memiliki tujuan yaitu meningkatkan kecerdasan praktis dan membuat siswa lebih efektif dalam memecahkan berbagai masalah yang disajikan. Masalah tersebut ditemukan berdasarkan pengalaman siswa. Pembelajaran yang harus dikembangkan menurut aliran filsafat progresivisme adalah memperhatikan kebutuhan individual yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara dewasa, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Nana Supriatna, 2007 : 32). Implementasi IPS dalam pandangan filsafat progresivisme adalah bagaimana mata pelajaran IPS mampu membekali kepada siswa agar dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Masalah-masalah tersebut misalnya kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketertinggalan,

kenakalan remaja, narkoba, dan lain-lain. Jadi pembelajaran yang ditekankan dalam aliran progresivisme lebih bersifat implementatif.

Rekonstruksionisme berpendapat bahwa sekolah harus diarahkan kepada pencapaian tatanan demokratis yang mendunia. Aliran ini menghendaki agar setiap individu dan kelompok tanpa mengabaikan nilai-nilai masa lalu, mampu mengembangkan pengetahuan, teori, atau pandangan tertentu yang paling relevan dengan kepentingan mereka melalui pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran guna memproduksi pengetahuan baru (Nana Supriatna, 2007 : 32). Aliran filsafat ini lebih menekankan agar siswa dalam pembelajaran mampu menemukan (inquiri). Penemuan ini bersifat informasi baru bagi siswa berdasarkan bacaan yang ia lakukan. Pembelajaran lebih ditekankan pada proses bukan hanya hasil. Aktivitas siswa menjadi prioritas utama dalam berlangsungnya pembelajaran. Dengan cara seperti ini diharapkan siswa mampu menemukan (inquiri) suatu informasi baru yang berguna bagi dirinya. Dalam implementasi pembelajaran IPS, misalnya siswa mempelajari fakta-fakta yang ada di sekelilingnya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut akhirnya siswa menemukan definisi mengenai sesuatu, tanpa harus didefinisikan lebih dahulu oleh guru. Misalnya diperkenalkan adanya fakta orang-orang yang melakukan kegiatan jual-beli. Setelah melihat aktivitas orang-orang tersebut akhirnya siswa menemukan definisi mengenai penjualan, pembelian, penawaran, pasar, uang, dan lain-lain. Agar proses inquiri dalam pembelajaran ini dapat terjadi kepada siswa, maka guru tidak memberikan definisi tersendiri, biarkan siswa mecarinya berdasarkan fakta yang ia temukan.

B. Perkembangan Psikologi Siswa

Pengembangan kurikulum harus memperhatikan tingkat perkembangan psikologi siswa. Hal ini perlu dilakukan agar materi dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan sampai pemberian materi kepada siswa tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya, misalnya materi yang semestinya diberikan kepada siswa di SMA, ternyata diberikan di SD.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang diberikan di sekolah mulai dari tingkat dasar (SD) hingga tingkat menengah (SMP/SMA). Kurikulum IPS yang dikembangkan harus memperhatikan tingkat perkembangan psikologi siswa.

Teori yang digunakan untuk melihat perkembangan psikologi siswa diantaranya teori Piaget dan Bruner. Perkembangan psikologi individu menurut Piaget berkembang secara kualitatif melalui empat tahapan. Setiap tahap memiliki karakteristiknya. Keempat tahap perkembangan tersebut yaitu :

1. *Sensorimotor period* (0,0 – 2,0 tahun). Periode ini ditandai oleh penggunaan sensorimotorik (dalam pengamatan dan penginderaan) yang intensif terhadap dunia sekitarnya. Prestasi intelektual yang dicapai dalam periode ini ialah perkembangan bahasa, hubungan tentang obyek, kontrol skema, kerangka berpikir, pembentukan pengertian, pengenalan hubungan sebab akibat. Perilaku kognitif tampak antara lain :
 - a. menyadari dirinya berbeda dari benda-benda lain sekitarnya
 - b. sensitif terhadap rangsangan suara dan bahaya
 - c. mencoba bertahan pada pengalaman-pengalaman yang menarik
 - d. mendefinisikan obyek/benda dengan manipulasinya
 - e. mulai memahami ketepatan makna suatu obyek.

2. *Preoperational period* (2,0 – 7,0 tahun). Periode ini terbagi dalam dua tahapan ialah : *preconceptional* (2,0 – 4,0 tahun) dan *intuitive* (4,0 – 7,0 tahun). Periode *preconceptional* ditandai dengan cara berpikir yang bersifat transduktif (menarik konklusi tentang sesuatu yang khusus atas dasar hal khusus; misal, sapi disebut kerbau). Periode intuitif ditandai oleh dominasi pengamatan yang bersifat *egocentric* (belum memahami cara orang lain memandang obyek yang sama), seperti searah (selancar). Perilaku kognitif yang tampak antara lain :
 - a. *self-centered* dalam memandang dunianya
 - b. dapat mengklasifikasikan obyek-obyek atas dasar satu ciri tertentu yang memiliki ciri yang sama, mungkin pula memiliki perbedaan dalam hal yang lainnya
 - c. dapat melakukan koleksi benda-benda berdasarkan suatu ciri atau kriteria tertentu
 - d. dapat menyusun benda-benda, tetapi belum dapat menarik inferensi dari dua benda yang tidak bersentuhan meskipun terdapat dalam susunan yang sama.

3. *Concrete operational period* (7,0 –11/12 tahun)
 Pada periode ini mulai mengembangkan kemampuan berpikir beraneka. Mereka sudah dapat membedakan mana benda atau kondisi yang tidak berubah dan mana yang berubah. Kemampuan asimilasi skemanya sudah lebih besar untuk menampung berbagai perbedaan yang ada dalam suatu koordinasi yang konsisten antarskema. Oleh karena itu, dalam tingkat operasi kongkret ini struktur kognitif siswa sudah relatif stabil. Bahkan antarskema itu terjadi saling menunjang sehingga daya dukung untuk belajar menjadi makin besar.

Kemampuan mengelompokkan sudah berkembang pada masa ini walaupun masih terbatas pada hal-hal yang kongkret. Artinya pada tingkat ini siswa telah mampu melakukan klasifikasi benda-benda; mampu menemukan persamaan dan perbedaan di antara sekelompok benda. Atas dasar persamaan dan perbedaan itu siswa mampu mengelompokkan benda-benda yang sejenis tadi. Jadi kemampuan analisis tingkat awal sudah dapat dilakukan siswa.

Meskipun demikian, kemampuan berpikir lebih abstrak belum sepenuhnya berkembang pada masa operasi kongkret. Kemampuan berpikir yang formal dan abstrak sepenuhnya baru dapat berkembang dengan baik dimulai pada usia 12 tahun.

4. *Formal operational period* (11/12 – 14/15 tahun)
 Periode ini ditandai dengan kemampuan untuk mengoperasionalkan kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat oleh obyek-obyek yang bersifat kongkret. Perilaku kognitif yang tampak pada siswa antara lain :
 - a. kemampuan berpikir hipotesis-deduktif
 - b. kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan dua atau lebih kemungkinan yang ada.
 - c. Kemampuan mengembangkan suatu proporsi atas dasar proporsi-proporsi yang diketahui
 - d. Kemampuan menarik generalisasi dan inferensi dari berbagai kategori objek yang beragam.

Perkembangan perilaku kognitif dari Piaget berkenaan perilaku belajar. Menurut Piaget, proses belajar terjadi apabila proses pengolahan data yang aktif di pihak yang belajar. Pengolahan data yang aktif itu merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan mencari informasi dan dilanjutkan dengan kegiatan penemuan-penemuan (*discovery*). Berdasarkan pandangan ini siswa dianggap sebagai subyek belajar

yang aktif menimbulkan stimulasi bagi dirinya, mencari jawaban terhadap stimulasi tersebut, serta mengembangkan stimulasi untuk hal-hal yang baru.

Apa yang sudah ada pada diri seseorang itu antara lain adalah kapasitas dasar kemampuan intelektualnya. Kapasitas dasar intelektual ini dinamakan skema. Setiap orang berbeda dalam skema yang dimilikinya tergantung pada apa yang sudah dipelajari dan dimilikinya. Skema yang dimiliki seseorang memiliki sifat yang selalu berkembang dipengaruhi kematangan bio-psikologis, pengalaman belajar yang pernah ditempuhnya, lingkungan sosialnya dan equilibrium dalam dirinya. Seseorang baru dapat dikatakan belajar kalau skemanya berkembang. Jadi pendidikan baru bermakna kalau skema siswa berubah ke arah yang lebih maju.

Proses perubahan skema menurut Piaget terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses penyesuaian informasi yang akan diterima sehingga menjadi sesuatu yang dikenal oleh siswa. Proses penyesuaian yang dilakukan dalam asimilasi adalah mengolah informasi yang akan diterima sehingga memiliki berbagai kesamaan dengan apa yang sudah ada dalam skema. Kesamaan-kesamaan itu menyebabkan apa yang akan dipelajari mudah dicerna oleh siswa. Proses kemudian adalah penempatan informasi yang sudah diubah tadi dalam skema yang sudah ada. Untuk penempatan tersebut skema perlu menyesuaikan diri dan ini yang dinamakan dengan proses akomodasi. Dengan adanya proses akomodasi informasi yang baru diterima tadi menjadi bagian yang utuh dari skema yang lama berkembang menjadi suatu skema baru yang siap sebagai dasar baru untuk menerima informasi baru.

Kalau diperhatikan tahap uraian perkembangan kognitif dari Piaget, maka siswa Sekolah Dasar masuk dalam katagori masa *Conceret operational period* (7-12 tahun), siswa SMP dan SMA berada pada *Formal operational period*.

Menurut teori Bruner, ada tiga tahapan berpikir yang dialami yaitu *enactive*, *iconic* dan *symbolic*. Pada tahap *enactive* apa yang dipelajari, dikenal, atau pun diketahui hanya sebatas dalam ingatan. Kemampuan memproses informasi belum terjadi. Demikian pula dengan kemampuan berpikir yang lebih jauh dari apa yang terkandung dalam informasi tidak dapat dilakukan. Artinya, seseorang berpikir masih terbatas pada ruang, waktu, dan informasi yang diterimanya sebagaimana adanya (S. Hamid Hasan, 1996 : 88).

Pada tahap *iconic* anak sudah dapat mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih jauh. Kemampuan mereka dalam berpikir tidak lagi terbatas pada ruang, waktu, dan apa yang tersaji secara eksplisit dalam informasi yang diterima. Mereka sudah dapat mencerna dan memahami apa-apa yang tidak ada di lingkungan geografis di sekitar mereka ataupun pada waktu sekarang. Kemampuan berpikir yang lebih abstrak, tidak terbatas misalnya dengan alat yang harus terlibat atau dapat diraba, sudah mulai berkembang. Mereka sudah dapat menggali informasi yang lebih jauh dari apa yang tertera dalam tulisan atau informasi yang diberikan. Kemampuan berpikir logis sudah dapat mereka lakukan walaupun harus dikatakan bahwa tingkat abstraksi konsep masih sangat rendah (S. Hamid Hasan, 1996 : 88).

Pada tingkat *symbolic* siswa sudah mampu berpikir abstrak. Simbol-simbol bahasa, matematika, ataupun disiplin ilmu lainnya sudah dapat mereka pahami sebagaimana harusnya. Mereka sudah mampu diajak berpikir dalam bidang ilmu pada tingkat abstrak yang dapat diandalkan. Tingkat abstraksi yang mereka miliki sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam pengembangan pendidikan

keilmuan. Pada jenjang ini mereka sudah dapat diajak berpikir analisis, sintesis, maupun evaluatif (S. Hamid Hasan, 1996 : 88-89).

Berdasarkan teori Bruner tersebut, maka tingkat perkembangan psikologi siswa dapat dikategorikan yaitu SD periode *enactive* dan *iconic*, SMP periode *iconic* dan *symbolic* dan SMA periode *symbolic*.

C. Pengertian dan Tujuan IPS

IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi (Puskur, 2001 : 9). Materi pelajaran IPS merupakan penggunaan konsep-konsep dari ilmu sosial yang terintegrasi dalam tema-tema tertentu. Misalkan materi tentang Pasar, maka harus ditampilkan kapan atau bagaimana proses berdirinya (Sejarah), dimana pasar itu berdiri (Geografi), bagaimana hubungan antara orang-orang yang berada di pasar (Sosiologi), bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang menjual atau membeli di pasar (Antropologi) dan berapa atau jenis-jenis barang yang diperjualbelikan (Ekonomi).

Muriel Crosby menyatakan bahwa IPS diidentifikasi sebagai studi yang memperhatikan pada bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana orang memecahkan masalah-masalah, bagaimana orang hidup bersama, bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya (Leonard S. Kenworthy, 1981 : 7). IPS menggambarkan interaksi individu atau kelompok dalam masyarakat baik dalam lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Interaksi antar individu dalam ruang lingkup lingkungan mulai dari yang terkecil misalkan keluarga, tetangga, rukun tetangga atau rukun warga, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara dan dunia.

Karakteristik tujuan IPS menurut Bruce Joyce (Leonard S. Kenworthy, 1981 : 7) memiliki tiga kategori yaitu :

1. Pendidikan kemanusiaan.
2. Pendidikan kewarganegaraan.
3. Pendidikan intelektual.

Pendidikan kemanusiaan memiliki arti bahwa IPS harus membantu anak memahami pengalamannya dan menemukan arti atau makna dalam kehidupannya. Dalam tujuan pertama ini terkandung unsur pendidikan nilai. Guru dapat menyajikan materi IPS dalam tujuan ini misalkan dalam materi lingkungan keluarga, ditanyakan kepada siswa mengenai pekerjaan apa yang ia lakukan di keluarga dan mengapa ia melakukan pekerjaan tersebut. Siswa mungkin akan menjawab dari pengalamannya sebagai anak yang paling besar harus membimbing adik-adiknya. Ia melakukan hal tersebut misalkan karena timbulnya rasa tanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan mengandung arti bahwa siswa harus dipersiapkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan masyarakat. Siswa memiliki kesadaran untuk meningkatkan prestasinya sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang setia pada negara. Pendidikan nilai dalam tujuan ini lebih ditekankan pada kewarganegaraan. Materi yang disajikan, misalnya ketika berbicara tentang lingkungan sekolah, maka anak diminta untuk belajar dengan baik. Mereka adalah generasi penerus yang akan menggantikan generasi sekarang.

Pendidikan intelektual mengandung arti bahwa anak membutuhkan untuk memperoleh ide-ide yang analitis dan alat-alat untuk memecahkan masalah yang dikembangkan dari konsep-konsep ilmu sosial. Dalam memecahkan masalah anak akan dihadapkan pada upaya mengambil keputusan sendiri. Dengan peningkatan kematangan, anak harus belajar untuk menjawab pertanyaan dengan benar dan menguji ide-ide kritis dalam situasi sosial. Misalnya, dalam materi tentang pasar, siswa dihadapkan pada masalah tentang mana yang lebih baik belanja di pasar tradisional atau swalayan apabila ibunya ingin membeli sayuran. Dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan tersebut siswa akan dihadapkan berbagai pertimbangan, seperti jarak pasar dari rumah, ongkos yang digunakan, perbandingan harga sayuran di pasar tradisional dan swalayan, dan lain-lain.

Jack R. Fraenkel (1980 : 8-11) membagi tujuan IPS dalam empat kategori yaitu :

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Sikap
4. Nilai

Pengetahuan adalah kemahiran dan pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Tujuan pengetahuan ini membantu siswa untuk belajar lebih banyak tentang dirinya, fisiknya dan dunia sosial. Misalnya, siswa dikenalkan dengan konsep apa yang disebut dengan lingkungan alam, lingkungan buatan, keluarga, tetangga, dan lain-lain.

Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu sehingga digunakan pengetahuan yang diperolehnya. Beberapa keterampilan yang ada dalam IPS adalah :

- a. Keterampilan berpikir yaitu kemampuan mendeskripsikan, mendefinisikan, mengklasifikasi, membuat hipotesis, membuat generalisasi, memprediksi, membandingkan dan mengkontraskan, dan melahirkan ide-ide baru.
- b. Keterampilan akademik yaitu kemampuan membaca, menelaah, menulis, berbicara, mendengarkan, membaca dan meninterpretasi peta, membuat garis besar, membuat grafik dan membuat catatan.
- c. Keterampilan penelitian yaitu mendefinisikan masalah, merumuskan suatu hipotesis, menemukan dan mengambil data yang berhubungan dengan masalah, menganalisis data, mengevaluasi hipotesis dan menarik kesimpulan, menerima, menolak atau memodifikasi hipotesis dengan tepat.
- d. Keterampilan sosial yaitu kemampuan bekerjasama, memberikan kontribusi dalam tugas dan diskusi kelompok, mengerti tanda-tanda non-verbal yang disampaikan oleh orang lain, merespon dalam cara-cara menolong masalah yang lain, memberikan penguatan terhadap kelebihan orang lain, dan mempertunjukkan kepemimpinan yang tepat.

Sikap adalah kemahiran mengembangkan dan menerima keyakinan-keyakinan, interest, pandangan-pandangan, dan kecenderungan tertentu. Sedangkan nilai adalah kemahiran memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung ketika sesuatu dianggap penting dengan tindakan yang tepat.

D. Pengorganisasian Materi

Pengorganisasian materi membahas mengenai bagaimana materi yang ada diatur sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Materi IPS dapat diorganisasikan ke dalam bentuk yang terpisah-pisah (*separated*), korelasi (*corelated*), dan fusi (*integrated*).

1. Pengorganisasian Terpisah

Pengorganisasi terpisah yaitu pengajaran setiap disiplin ilmu-ilmu sosial dilakukan secara terpisah-pisah. Dalam pengorganisasian seperti ini sejarah diajarkan terlepas dari geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi atau politik, begitu pula sebaliknya. Materi yang harus dipelajari siswa sepenuhnya dikembangkan dari masing-masing disiplin ilmu yang bersangkutan (S. Hamid Hasan, 1996 : 147).

Bentuk pengorganisasian yang bersifat terpisah memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya adalah siswa belajar sepenuhnya pada satu disiplin ilmu, misalnya ketika siswa belajar sejarah dia sepenuhnya terpusat pada sejarah saja, begitu pula disiplin ilmu sosial lainnya. Kelemahannya adalah ketika siswa memahami permasalahan sosial yang sangat kompleks tidak didekati secara utuh dan menyeluruh. Persmasalahan itu hanya dilihat dari satu aspek disiplin ilmu saja.

2. Pengorganisasian Korelatif

Pengorganisasian yang korelasi mencoba mencari keterkaitan pembahasan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya dengan sudut pandang dari disiplin ilmunya masing-masing. Dalam pengorganisasian semacam ini tidak menghilangkan ciri dari disiplin ilmu yang bersangkutan. Pendidikan sejarah sebagai suatu keutuhan tetap saja dipertahankan, begitu juga disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya. Contoh pengorganisasian materi ini adalah peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sejarah akan menceritakan bagaimana kronologi peristiwa tersebut ; Geografi akan membahas dimana dan bagaimana letak geografis peristiwa tersebut, mengapa terjadi di Jakarta ; Sosiologi akan membahas bagaimana hubungan sosial di antara para pejuang yang terlibat dalam peristiwa tersebut baik antara golongan tua maupun golongan muda ; Antropologi akan membahas nilai-nilai budaya apa yang dimiliki oleh para pejuang yang terlibat dalam peristiwa proklamasi ; Politik akan membahas bagaimana kondisi politik dan pemerintahan ketika proklamasi tersebut berlangsung. Model pengorganisasian materi membutuhkan tim pengajar (team teaching) yang kompak. Antar guru bidang studi dalam ilmu-ilmu sosial harus mampu bekerja dengan baik. Mereka dapat saling bertukar pikiran mengenai pokok-pokok bahasan yang memiliki keterkaitan.

3. Pengorganisasian Fusi

Dalam model pengorganisasian fusi, disiplin ilmu sudah tidak tampak dalam pembahasan materi pelajaran IPS. Terjadi peleburan dalam pembahasan materi. Peleburan yang dilakukan tidaklah berarti melahirkan suatu disiplin ilmu baru hasil sintesa dari disiplin-disiplin ilmu. Fusi dilakukan lebih didasarkan atas dasar pertimbangan kepentingan pendidikan dan bukan atas dasar kepentingan keilmuan.

Materi yang dikembangkan berdasarkan fusi dapat dilakukan apabila pokok bahasan tidak lagi diidentifikasi dari suatu disiplin ilmu. Pengembangan materi dapat berasal fenomena sosial yang ada. Selain itu, pengembangan materi dapat pula dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai teori, generalisasi, konsep, prosedur, yang berlaku untuk berbagai disiplin ilmu. Misalnya pembahasan tentang penduduk. Untuk pembahasan ini konsep-konsep penting yang digunakan bukan mengidentifikasi disiplin ilmu asal konsep tersebut. Konsep distribusi penduduk misalnya, dilihat dari distribusi geografis, distribusi sosiologis, dan distribusi antropologis, bukan hanya merupakan satu-satunya konsep dari ekonomi. Dengan pembahasan seperti ini siswa memiliki keleluasaan dalam penggunaan konsep distribusi.

BAB IV

KURIKULUM MASA DEPAN MATA PELAJARAN IPS

A. Visi Mata Pelajaran IPS

Visi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bagaimana kurikulum IPS yang diinginkan di masa yang akan datang. Masa datang yang dimaksud adalah perubahan yang diharapkan dalam jangka panjang. Hal ini perlu dirumuskan mengingat perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepatnya. Perubahan banyak terjadi dalam berbagai sektor kehidupan khususnya dalam kehidupan sosial. Untuk menyikapi perubahan-perubahan tersebut perlu adanya rumusan visi masa depan mata pelajaran IPS.

IPS sebagai mata pelajaran yang mengkaji berbagai perilaku dan interaksi manusia dalam kehidupan sosial, memiliki aspek keruangan atau spasial. Aspek spasial dalam rumusan visi IPS ke depan harus menjadi landasan. Aspek spasial tersebut adalah lokal, nasional dan global atau internasional.

Visi mata pelajaran IPS dalam aspek lokal yaitu mata pelajaran IPS harus memiliki basis lokal. Basis lokal yang dimaksud adalah keunggulan lokal yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat di mana siswa berada harus dijadikan pondasi dalam mengembangkan materi IPS. Keunggulan lokal yang dimaksud dapat berupa kearifan lokal yang terbentuk dalam sistem budaya masyarakat. Pentingnya basis lokal agar pembelajaran IPS mampu melihat aspek lokalitas dimana siswa berada. Aspek lokalitas dapat berfungsi untuk membangun jati diri. Perubahan-perubahan global yang menembus berbagai sektor kehidupan siswa tidak akan mencerabut nilai-nilai lokal yang sudah lama hidup dalam lingkungan sosial dimana siswa tinggal. Pemaknaan lokal bukan disikapi dengan sikap pelestarian, akan tetapi lebih pada pengembangan. Nilai-nilai lokal perlu dikembangkan dan menjadi materi IPS yang ditempatkan pada kedudukan sejajar dengan nilai-nilai global.

Aspek nasional dalam visi kurikulum IPS ke depan yaitu mata pelajaran IPS tetap harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme merupakan konsep politik yang terbentuk karena adanya latar belakang sejarah yang sama. Kesamaan latar belakang sejarah yang sama harus dapat menanamkan rasa memiliki terhadap negara Republik Indonesia. Kecintaan terhadap bangsa bukanlah merupakan doktrin ideologi negara yang bersifat pasif dan dogmatis, akan tetapi merupakan doktrin yang bersifat dinamis, artinya doktrin yang senantiasa menghadapi perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi. Hal ini perlu ditanamkan dengan harapan agar ketahanan diri sebagai warga negara dapat terjaga ketika meghadapi gelombang perubahan. Perubahan yang menembus berbagai sendi kehidupan siswa jangan sampai mencerabut rasa kebangsaannya. Seorang siswa dapat bergaul dalam komunitas global tetapi dia tetap sebagai warga negara bangsa.

Kurikulum IPS sebagai mata pelajaran yang mempelajari berbagai kehidupan masyarakat yang kompleks haruslah dapat mengadopsi keragaman yang ada pada masyarakat bangsa Indonesia. Pengakuan terhadap eksistensi keragaman haruslah ditanamkan kepada diri siswa. Keragaman harus diakui sebagai realitas obyektif yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini perlu dikembangkannya konsep multikultur dalam melihat realitas masyarakat Indonesia yang beragam. Hal yang harus dilakukan dalam melihat keragaman ini adalah perlu dicari relasi di antara keragaman. Keragaman jangan disikapi dengan sikap dikotomi, yang membedakan secara tajam antara satu budaya

dengan budaya yang lain, apalagi sampai menafikan terhadap eksistensi budaya yang lainnya. Sikap dikhotomi tersebut dapat menimbulkan masalah sosial yaitu terciptanya konflik sosial secara horizontal. Eklusivisme budaya harus dihindari, tetapi harus dibangun inklusivisme.

Aspek visi dalam konteks global adalah kurikulum IPS harus bisa membaca kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada era globalisasi. Ciri dari globalisasi ini adalah terjadinya akselerasi perubahan yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi telah menghilangkan batas-batas geografis antar wilayah atau belahan dunia. Selain itu, globalisasi telah menciptakan masyarakat yang semakin kompetitif. Oleh sebab itu kurikulum IPS harus mampu menciptakan siswa menjadi warga dunia yang memiliki keunggulan kompetitif.

B. Konsep Materi Kurikulum IPS

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis yang digunakan sebaiknya landasan progresivisme dan rekonstruksionisme. Kedua landasan filosofis ini penting, mengingat kurikulum IPS masa depan haruslah memiliki muatan materi yang senantiasa dapat menangkap kecenderungan-kecenderungan perubahan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perubahan yang terjadi di luar sekolah begitu cepatnya yang terkadang tidak beriringan atau tidak dikejar oleh perubahan yang dilakukan oleh sekolah. Terjadi suatu kondisi yang berbanding terbalik, di luar sekolah begitu cepat sedangkan di sekolah perubahan terjadi lambat.

Perubahan di luar sekolah banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan siswa. Saluran yang menjadi sarana bagi perubahan di luar sekolah khususnya media informasi. Berbagai informasi yang datang melalui media mempengaruhi terhadap perilaku kehidupan siswa. Bahkan pengaruh media di luar akan jauh lebih besar daripada perubahan yang diinginkan oleh siswa. Kondisi seperti ini harus disikapi dengan penyajian materi pelajaran yang bersifat kontekstual. Apa yang terjadi dan dilihat oleh siswa sebagai pengalaman hidupnya sehari-hari, harus menjadi sumber belajar utama. Model pembelajaran yang terlalu berorientasi pada buku ajar semata harus dihindari. Buku ajar hanya salah satu sumber belajar yang dipakai.

Pembelajaran IPS yang bersifat verbalisme dan lebih menekankan pada pemahaman yang bersifat teoritis belaka harus dikurangi. Cara pembelajaran ini lebih banyak dipengaruhi aliran filsafat esensialisme. Penerapan model pembelajaran yang demikian akan menyebabkan materi pelajaran yang diterima oleh siswa akan menjauh dari lingkungan sosial dimana dia berada. Siswa tidak mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Sedangkan dampak akselerasi perubahan yang dihadapi oleh siswa dapat menimbulkan permasalahan kehidupan yang begitu kompleks. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dilakukan haruslah model pembelajaran yang dapat memberikan pembekalan kepada siswa untuk dapat memecahkan masalah yang ia hadapi. Landasan filsafat kurikulum yang harus dipegang adalah filsafat yang mengajarkan kecerdasan praktis dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi sendiri oleh siswa. Konsep-konsep atau teori yang diterima oleh siswa haruslah menjadi alat bagi siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam memecahkan masalah tersebut terjadi proses menemukan (*inquiri*) informasi baru. Informasi baru ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan siswa dalam mensikapi perubahan-perubahan yang terjadi baik saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep atau teori yang dipelajari dalam IPS haruslah memiliki muatan nilai praktis.

2. Jenjang Pendidikan dan Pengorganisasian Kurikulum

Jenjang pendidikan dan pengorganisasian kurikulum merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keterkaitannya terutama pada materi yang diberikan harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Materi IPS harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, apakah materi itu sesuai untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Jenjang pendidikan berkaitan dengan perkembangan psikologi individu. Pada siswa Sekolah Dasar pada umumnya masih berada pada tingkatan berpikir yang bersifat konkret. Pada tahapan ini ditandai dengan kemampuan mengklasifikasikan angka-angka atau bilangan, mengkonservasi pengetahuan tertentu dan proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika meskipun masih terikat dengan obyek-obyek yang bersifat kongkret. Kemampuan mengembangkan berpikir beraneka mulai berkembang. Mengklasifikasi benda-benda dengan menemukan persamaan dan perbedaan di antara sekelompok benda. Atas dasar persamaan dan perbedaan itu siswa mampu mengelompokkan benda-benda yang sejenis. Jadi, kemampuan analisis tingkat awal sudah dapat dilakukan siswa. Contoh siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan, mana yang termasuk jenis sayur-sayuran dan mana yang termasuk jenis buah-buahan.

Tingkat perkembangan berpikir siswa SD berdasarkan teori Bruner sudah masuk dalam tahap *iconic*. Dalam pelajaran IPS SD, siswa dapat diperkenalkan dengan ilustrasi-ilustrasi gambar yang sederhana. Dari ilustrasi tersebut, siswa diminta untuk memberikan interpretasi. Misalkan kita perhatikan gambar sekelompok orang yang sedang berkeliling kampung pada malam hari, masing-masing orang tersebut membawa kentungan dengan latar belakang pos ronda. Dari ilustrasi gambar tersebut bisa ditanyakan aspek pengetahuan dan nilai. Aspek pengetahuan kita tanyakan sedang apakah orang-orang tersebut, tentu jawabannya siskamling atau ronda malam. Aspek nilai, kita tanyakan mengapa orang-orang itu mau melakukan ronda malam. Jawabannya misalnya rasa tanggung jawab, gotong-royong, kebersamaan, dan lain-lain.

Pengorganisasian kurikulum IPS untuk SD lebih baik menggunakan pendekatan fusi. IPS sebagai materi pelajaran tidak menekankan disiplin ilmiahnya. Hal ini dikarenakan pada tingkat SD, kemampuan berpikir abstrak masih sulit dikembangkan. Kemampuan berpikir pada tingkat sekolah dasar lebih banyak bersifat konkret. Oleh sebab itu materi yang dikembangkan bersifat tematis. Tema-tema yang dikembangkan harus berangkat dari fenomena kehidupan sosial sehari-hari yang dilihat dan dialami oleh siswa.

Kemampuan berpikir siswa pada tingkat SMP sudah mulai berpikir secara abstrak. Berpikir yang bersifat abstrak masih dalam tataran yang masih sederhana. IPS sebagai disiplin ilmu sudah dapat diterapkan kepada siswa di tingkat SMP. Namun demikian IPS sebagai mata pelajaran yang harus dipahami secara utuh dan saling terkait antar disiplin ilmu masih tetap ditampilkan. Oleh sebab itu, pengorganisasian materi yang cocok untuk tingkat SMP adalah bersifat korelasi. Dalam pengorganisasian model ini, setiap disiplin ilmu-ilmu sosial masih tetap menampikkan. Akan tetapi materi yang dikembangkan harus memiliki korelasi antardisiplin ilmu. Dengan model pengorganisasian seperti ini, maka materi dapat dikemas dengan menampilkan tema-tema tertentu. Misalnya, pembahasan materi

sejarah harus memiliki tema yang bisa dikaji dari aspek geografis, ekonomi, sosiologi, antropologi dan politik, begitu pula materi mata pelajaran lainnya.

Implementasi model pengorganisasian yang korelasi membutuhkan tim guru (team teaching) yang benar-benar kompak. Tim guru IPS harus menjadi suatu tim yang berasal dari latar belakang ilmu-ilmu sosial dan mereka memiliki pengetahuan bagaimana mengemas materi pelajaran yang saling berkorelasi. Tema yang dikembangkan bisa bersifat teoretis maupun praktis. Teoretis artinya mengembangkan suatu konsep dari ilmu-ilmu sosial, misalnya konsep nasionalisme. Konsep ini merupakan konsep sejarah, akan tetapi dapat pula dicari korelasinya dengan pembahasan pendekatan geografi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Sedangkan konsep praktis artinya tema pembahasan materi dapat diangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tema tentang kemiskinan, masalah ini dapat dibahas dari sudut pandang sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dan politik.

Tingkat kemampuan berpikir pada jenjang SMA sudah berada pada kemampuan berpikir yang abstrak dan simbolik. Kemampuan berpikir yang demikian sudah sangat cocok dengan mengembangkan materi IPS dalam konteks keilmuan. Konsep-konsep atau teori-teori dari ilmu-ilmu sosial dapat dikembangkan pada materi pelajaran IPS di sekolah. Pengorganisasian kurikulum yang cocok pada jenjang SMA adalah pengorganisasian yang terpisah. Dalam pengorganisasian ini misalnya materi sejarah dilihat sebagai disiplin ilmu sejarah, begitu pula dengan materi ilmu-ilmu sosial lainnya. Pendekatan yang bersifat disiplin ilmu pada jenjang SMA, sangat cocok apabila dikaitkan dengan tujuan pendidikan di tingkat SMA. Pendidikan di SMA bertujuan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan demikian apabila siswa SMA akan melanjutkan ke perguruan tinggi pada jurusan ilmu-ilmu sosial, dia sudah mendapatkan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang teori-teori dasar ilmu-ilmu sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian konsep dan implementasi kurikulum IPS jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Konsep pengembangan kurikulum masa depan mata pelajaran IPS sebaiknya isinya lebih menekankan pada muatan materi kurikulum yang berlandaskan pada konsep multikultur dan nilai-nilai humanistik. Konsep tersebut menonjolkan prinsip keadilan sosial, pembebasan, kearifan lokal, ekonomi rakyat, nasionalisme, dan kearifan masa lampau untuk melangkah ke masa depan.
- b. Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran IPS, masih ditemukan berbagai permasalahan, yaitu yang berkaitan dengan isi dokumen kurikulum, utamanya tentang Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Selain permasalahan dokumen kurikulum, permasalahan dalam implementasi kurikulum terutama masalah belum optimalnya guru dalam menyusun program silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), struktur program yang tidak seimbang antara alokasi waktu dengan jumlah Kompetensi Dasar (KD), strategi pembelajaran yang masih satu arah, penilaian berbasis kelas yang kurang variatif, dan sarana pembelajaran yang masih minim, serta kualifikasi guru yang masih rendah.

B. Rekomendasi

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, ada beberapa rekomendasi untuk kebijakan pengembangan kurikulum masa depan mata pelajaran IPS, yaitu:

1. Jangka Pendek
 - a. Perlu menata ulang Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan proporsi dan pemerataan distribusi pada tiap jenjang
 - b. Perlu pelatihan dan sosialisasi untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru di berbagai jenjang pendidikan
 - c. Perlu ada konsistensi antara pengembangan kurikulum mata pelajaran IPS dengan penilaian hasil belajar
 - d. Pemerintah diharapkan memperluas akses bagi setiap satuan pendidikan untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran IPS yang memadai dan berkesinambungan.
2. Jangka Panjang
Pengembangan kurikulum masa depan mata pelajaran IPS harus memiliki landasan filosofi yang jelas dengan berlandaskan aspek-aspek multikultur, nilai-nilai humanis, prinsip keadilan dan pembebasan, serta terjaganya kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abin Syamsuddin Makmun, (1996), *Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*, Bandung : Rosdakarya.
- Asmawi Zainul, (2001), *Alternative Assesment*, Jakarta : Depdiknas.
- Collin, Gillian & Dixon Hazel, (1991), *Integrated Learning Planned Curriculum Units*, Australia : Bookshelf.
- Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Ilmu Sosial Sekolah Dasar*, Puskur Balitbang Depdiknas, Jakarta , 2001
- Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Juni 2002, Puskur balitbang Depdiknas.
- R. Fraenkel, Jack, (1980), *Helping Students Think Value Strategies for Teaching Social Studies*, New Jersey : Prentice-Hall.
- S. Hamid Hasan, (1996), *Pendidikan Ilmu Sosial*, Jakarta : Depdiknas.
- S. Kenworthy, Leonard, (1981), *Social Studies For The Eighties*, Canada : John Wiley & Sons.